



**PROSEDING SEMINAR NASIONAL  
SUPAYA BASA JAWA TETEP URIP NGREMBAKA  
REKADAYA LUMANTAR PAWIYATAN**

**ISBN 978-602-8054-40-9**

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
BERKERJASAMA DENGAN FORUM KOMUNIKASI MGMP  
BAHASA JAWA SMA/MA/SMK/SMP/MTs  
SEMARANG, 31 OKTOBER – 1 NOVEMBER 201**

**PROSEDING SEMINAR NASIONAL  
SUPAYA BASA JAWA TETEP URIP NGREMBAKA  
REKADAYA LUMANTAR PAWIYATAN**

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
BERKERJASAMA DENGAN FORUM KOMUNIKASI MGMP BAHASA JAWA  
SMA/MA/SMK/SMP/MTs.**

**ISBN 978-602-8054-40-9**

**PENULIS**

Pemakalah dan Peserta Seminar Nasional Supaya Basa Jawa Tetep Urip Ngrembaka  
Rekadaya lumantar pawiyatan

**PENANGGUNG JAWAB**

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
(Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang)

**EDITOR**

Didik Supriadi

**DESAIN SAMPUL**

Danest Art

**PENERBIT**

Griya Jawi Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Unnes  
bekerjasama dengan Penerbit Cipta Prima Nusantara

**REDAKSI**

Kampus Sekaran, B8, FBS, Unnes, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah

**PANITIA SEMINAR NASIONAL**

**KETUA**

Sungging Widagdo, S.Pd., M.Pd.

**SEKRETARIS**

Irkhamudin

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Pembelajaran Bahasa Jawa dan Dialeknya <b>Agung Bahroni</b>	1
Pengembangan Media Pembelajaran Audio Humoris Keterampilan Menulis Cita Cekak Bermuatan Konservasi Budaya <b>Didik Supriadi, S. Pd., M. Pd.</b>	7
Sistem Manajemen Berbasis Pelayanan Prima dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) untuk Meningkatkan Kualitas Calon Guru Bahasa Jawa FBS Unnes <b>Ucik Fuadhiyah, S.Pd., M.Pd.</b>	14
Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Jawa <b>Esti Sudi Utami</b>	22
Pengembangan <i>E-Learning</i> sebagai Alternatif Media Pembelajaran Bahasa Jawa Berbasis Internet SMA Negeri 1 Prambanan Sleman <b>Dian Nofi Etikasari</b>	28
Peningkatan Ketrampilan Menulis Naskah Drama dengan Menggunakan Media Delasari ( <i>Dengar Lagu Campursari</i> ) pada Siswa Kelas XII IPA 2 Semester 1 SMA N 2 Kendal Tahun Pelajaran 2016-2017 <b>Dwi Syaeful Mujab, S. Pd.</b>	32
Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek ( <i>Project Based Learning</i> ) Materi Teks <i>Pawarta</i> Melalui Buletin Berbahasa Jawa <b>Eko Gunawan, M.Pd.</b>	39
Peran Guru Bahasa Jawa dalam Membangun Moralitas Siswa melalui <i>Unggah- Ungguh Basa Jawa</i> di Sekolah <b>Agus Dwi Prasetyo, S.Pd., Niken Estirohmawati, S.Pd.</b>	45
Model <i>Mind Mapping</i> dalam Pembelajaran Petikan Novel Berbahasa Jawa Pada Siswa Kelas XI SMAN 1 Rembang <b>Henry Prastyorini, S.Pd.</b>	50
Pengembangan Pendidikan Karakter Pembelajaran Menulis Naskah Drama melalui Media <i>Cerkak Manja</i> <b>Romdonah</b>	57
Nilai Pendidikan Karakter dalam Naskah Sandiwara Jawa <i>Kanca Sejati Karya</i> Trisno Santoso dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Jawa di SMP <b>Rudi Permono Putro, S.Pd.</b>	63
Tiwikrama Bahasa Jawa melalui Wikipedia <b>Triana Kanthi Wati</b>	72

<i>Piwulang Jawa</i> sebagai Sumber Pendidikan Karakter <b>Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum., Widodo. S.S., M.Hum.</b>	78
Penerapan Strategi Pembelajaran Mencari Pasangan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Hasil Belajar dalam Pembelajaran <i>Cerkak Guna</i> Membangun Karakter Siswa <b>Yuniati Chasanah, S. Pd.</b>	89
Strategi Pembelajaran Novel Berbahasa Jawa dengan Media Komik Berbasis Android untuk Siswa SMA/SMK/MA <b>Winda Dwi Lestari, Sutarto Dwi Sutrisno</b>	95
Permainan Edukatif sebagai Alternatif Pembelajaran Menulis <i>Geguritan</i> <b>Pujianto, M.Pd.</b>	101
Busana Jawa Karaton Surakarta <b>Budyaningrat</b>	108

## KATA PENGANTAR

### PENGUATAN ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN MENGENAI BAHASA SASTRA DAN AKSARA JAWA

1/

Kebijakan mengenai arah dan strategi pelestarian dan pengembangan bahasa sastra dan aksara Jawa bagi Provinsi Jawa Tengah sudah jelas dan lengkap, yaitu melalui jalur pendidikan baik formal, nonformal, dan informal. Regulasi yang sudah dilakukan pemerintah provinsi misalnya terbitnya Peraturan Daerah tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa sudah ada, yaitu Perda no 9 th 2012. Pergubnya sudah ada, bahkan ditingkat dinas provinsi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merupakan bukti menindaklanjuti Perda dan Pergubnya. Yang menjadi persoalan adalah ditingkat implementasinya seringkali berbenturan dengan kebijakan pusat yang sering tidak sejalan. Kebijakan ujian nasional misalnya, menjadikan pembelajaran bahasa Jawa terkesan menjadi kurang penting dan disepelekan pihak sekolah. Hal inilah yang harus selalu terus menerus didorong dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah di lingkungan wilayah Jawa Tengah.

Kebijakan penerapan kurikulum tiga belas pada awal kemunculannya menjadi masalah bagi guru-guru bahasa Jawa. Kurikulum tiga belas, dalam penjelasannya disebut bahwa butir mulok (muatan lokal) boleh diisi pembelajaran bahasa daerah. Kata *boleh* memberi peluang kepada pemerintah daerah atau sekolah untuk tidak memberikan pelajaran bahasa daerah di sekolahannya.

Beruntung bahwa pemerintah daerah kita sigap mengambil kebijakan sehingga tidak ada satupun sekolah di wilayah ini yang tidak mengajarkan bahasa Jawa di sekolah mulai dari tataran sekolah dasar sampai jenjang sekolah menengah. Kebijakan kita sudah jelas bahwa pembelajaran bahasa Jawa merupakan muatan lokal wajib yang harus diajarkan sesuai amanat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Bahkan, yang menggembirakan ada beberapa Pemerintahan daerah di wilayah Jawa Tengah yang menindaklanjuti membuat Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/ Kota.

Lagi-lagi guru-guru kita diresahkan dengan tidak dimuatnya pembelajaran bahasa Daerah di tingkat Dapodik Pusat. Namun, hal inipun segera diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sehingga sekarang ini guru bahasa Jawa harus merasa lega, sungguhpun di sana sini masih ada beberapa kendala terutama dalam implementasinya di sekolah. Secara umum beberapa masalah, antara lain (1) masih banyak ditemukan guru bahasa Jawa di sekolah di wilayah kita yang tidak berasal dari bidang studi bahasa Jawa, sementara banyak lulusan dari prodi pendidikan bahasa Jawa yang belum bisa tertampung karena belum adanya formasi pegawai, (2) lemahnya implementasi pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, (3) pelatihan ketrampilan guru bahasa Jawa perlu terprogram dan fokus terutama bagi guru non jurusan bahasa Jawa, (4) kurikulum dan materi pembelajaran, (5) kewenangan pengelolaan di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

2/

Sebelum menjawab permasalahan, perlu dipaparkan kondisi kebahasaan di Indonesia. Adalah kenyataan bahwa Indonesia itu merupakan sebuah konsep pemikiran tunggal yang dibentuk dari keanekaragaman. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah sebuah harga mati karena memang demikian adanya. Pendek kata, Indonesia itu Papua, Indonesia itu Maluku, Indonesia itu Batak, dst. Artinya, dari segi kebahasaan masyarakat Indonesia haruslah dwibahasawan. Kita harus menguasai dan mengerti serta bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa negara serta harus

menguasai dan mengerti serta bangga terhadap bahasa daerahnya. Sebagai negara bangsa, bahasa daerah merupakan sebuah identitas kebangsaan. Inilah sesungguhnya kenyataan secara kebahasaan. Oleh karena itu, dalam pembukaan UUD 1945 dalam satu pasalnya disebut bahasa daerah wajib dipelihara dan dikembangkan. Hal ini karena berkaitan dengan identitas kebangsaan. Jauh sebelum Indonesia lahir terutama dalam rembug nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda pun disebut dengan jelas, terutama di butir ke tiga: *Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia* bukan satu bahasa sebagaimana butir ke satu dan kedua. Ini artinya, para *founding fathers* secara cerdas sudah memperhitungkan secara cermat persoalan ini.

Berdasar pada latar belakang di atas itulah pemeliharaan dan pengembangan bahasa daerah wajib dan penting. Bukan saja bahasa daerah merupakan sumber nilai kebangsaan dan kearifan lokal tetapi bahasa daerah merupakan cerminan identitas kedaerahan yang tentu saja menjadi identitas kebangsaan. Pernyataan ini seharusnya menjadi landasan pemikiran semua pemangku kebijakan karena seringkali timbul pertanyaan apakah pada era global ini pembelajaran bahasa daerah penting? Seberapa jauh pentingnya jika dibanding kepentingan global sekarang ini. Kurangnya kebijakan yang memihak pada pandangan ini menjadi salah satu sebab kecenderungan punahnya sebuah bahasa daerah di suatu wilayah, sungguhpun ada beberapa sebab lainnya.

Dengan demikian, sebuah produk hukum sebagai payung keberlangsungan hidup suatu bahasa daerah wajib kita dorong. Undang-undang Pelindungan Bahasa Daerah dan juga Pelindungan kesenian daerah menjadi penting. Hadirnya undang-undang pelindungan bahasa daerah sangat memungkinkan penyusunan kurikulum nasional memperhatikan undang-undang pelindungan bahasa daerah. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul berkenaan dengan pembelajaran bahasa Jawa menjadi terpecahkan. Memang, sekarang sudah ada Undang-Undang Bahasa yang masih dicampur dengan bendera dan lambang kebangsaan. Namun, karenan ya kurang fokus dan beberapa pasal mengenai bahasa daerah sangat lemah dan kurang strategis.

Regulasi implementasi nasional tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Keuntungan lain manakala ada sebuah wilayah daerah yang sudah tidak memiliki bahasa daerah, Pemda Provinsi berhak menggantinya dengan muatan lokal yang ada di daerah sebagai ciri pembeda dengan daerah lain, misalnya kesenian daerah yang ada. Keuntungan berikut bahwa antara pemerintah pusat dan provinsi dalam kaitannya dengan regulasi bahasa daerah menjadi *nyambung* dan termudahkan. Yang saya maksud adalah manakala ada persoalan di wilayah suatu daerah mengenai pembelajaran bahasa daerah misalnya, ketika dibawa ke pemerintah pusat memiliki gayut di bidang regulasi yang jelas.

Regulasi ini juga memungkinkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota menjadi lebih baik dan efektif, terutama dalam hal siapa yang bertanggungjawab, bagaimana peran gubernur, bupati, walikota, kepala dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten kota dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa daerah. Berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya bermuara pada regulasi di bagian pusat. Implikasi kebijakan tersebut berkaitan dengan masalah (1) dan (3) dapat diatasi dengan banyaknya alokasi dana untuk pelatihan guru bahasa Jawa terutama yang berlatarbelakang bukan dari bidang studi bahasa Jawa. Untuk masalah butir (4) dan (5) kurikulum bahasa Jawa dan pengelolaan kewenangan tetap berada di tingkat Dinas Provinsi dengan memberdayakan Dewan Bahasa Jawa Provinsi Jawa Tengah sebagai konsultan pembuatan kurikulum dan evaluasi buku teks dan buku pengayaan. Sementara itu, persoalan ke dua (2) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur koordinasi antarlembaga terutama pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jalur kedua hanya melalui jalur politik, yaitu produk

hukum. Perlunya undang-undang perlindungan bahasa daerah supaya kurikulum nasional memperhatikan undang-undang perlindungan bahasa daerah.

3/

Simpulan yang dapat diambil di sini sebagai berikut. Penguatan arah dan strategi mengenai bahasa sastra dan aksara Jawa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur produk hukum. Perlunya direkomendasi pembuatan Undang-undang Pelindungan Bahasa Daerah karena dalam Undang-undang Bahasa yang ada mengandung banyak kelemahan kaitannya arah dan strategi kebijakan bahasa daerah. Kedua, perlu diperkuat koordinasi antarlembaga baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perlu regulasi kewenangan antara kewenangan pusat (maksudnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota).

Demikian, pokok pikiran ini saya lontarkan semoga dapat didiskusikan selanjutnya dapat direkomendasikan menjadi masukan dari MGMP pada Kongres Bahasa Jawa yang akan datang.

\*)

Dipaparkan dalam acara Temu MGMP Lintas Provinsi tanggal 31 Oktober 2016 di Gedung Setengah Bundar Dekanat FBS Unnes.

**TEGUH SUPRIYANTO**  
Universitas Negeri Semarang